

POLICY BRIEF

MEMBENAHAI DEFISIT TALENTA DIGITAL

Policy Brief ini ditulis oleh :

Tri Wahyuni

Maria Agustini Permata Sari

Dewi Sartika

Policy Brief ini ditujukan untuk:

- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Pemerintah Daerah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Percepatan transformasi digital dari sisi kesiapan talenta digital di Indonesia masih menyisakan masalah. Beberapa persoalan diantaranya: kesenjangan *digital talent* yang masih tinggi, belum adanya diseminasi kebijakan talenta digital di level Pemerintah Daerah dan infrastruktur digital yang masih belum optimal. Guna menyelesaikan masalah tersebut dibutuhkan solusi, antara lain: penguatan kebijakan talenta digital di level pusat, optimalisasi penyediaan infrastruktur internet gratis, pengarusutamaan kebijakan talenta digital kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah, memperkuat ekosistem talenta digital, serta pemantauan alumni *Digital Talent Scholarship* (DTS). Adapun rekomendasi yang ditawarkan adalah agar kelima alternatif untuk ditindaklanjuti sebagai agenda kebijakan, dengan pengarusutamaan talenta digital ke dalam IKU Pemerintah Daerah sebagai prioritas

PENDAHULUAN



"Ini penting sekali untuk melakukan transformasi digital, negara kita membutuhkan talenta digital sebanyak kurang lebih 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan, ini perlu betul-betul sebuah persiapan... Kurang lebih 600.000 per tahun kebutuhan SDM sehingga Indonesia bisa membangun sebuah ekosistem yang baik bagi tumbuhnya talenta-talenta digital" (Joko Widodo).

Isu transformasi digital di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menjadi salah satu fokus dari enam pengarusutamaan pendekatan pembangunan digital. Salah satu arahan Presiden Joko Widodo dalam percepatan transformasi digital adalah terkait penyiapan kebutuhan SDM talenta digital.

Masyarakat menjadi *layer* yang paling penting dalam transformasi digital guna menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai katalis peningkatan daya saing nasional.

Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan talenta digital, strategi yang dilakukan pemerintah antara lain adalah melalui pelatihan digital bagi SDM nasional serta pemberian beasiswa Bidang TIK (Kominfo, 2020). Dibalik upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital melalui penyiapan SDM talenta digital, ternyata hasil yang didapatkan belum terlalu signifikan. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa dari kebutuhan 600.000 per tahun terdapat *talent gap* sekitar 400 ribu – 500 ribu setiap tahunnya. Oleh karena itu diperlukan strategi kebijakan agar tidak terjadi defisit tenaga ahli digital (*skills shortage*) yang dapat berdampak negatif terhadap daya saing Indonesia.

DESKRIPSI MASALAH

Perkembangan teknologi digital terus bergerak. Di satu sisi, Indonesia masih belum mampu memenuhi talenta digital sebagai bagian dari proses transformasi digital. Beberapa permasalahan yang menghambat terwujudnya pemenuhan talenta digital antara lain :



1. Kesenjangan Digital Talent Masih Tinggi

Hasil studi Balitbang SDM Kemenkominfo memproyeksikan jumlah lulusan bidang teknologi informasi (TI) di Indonesia sampai dengan tahun 2025 hanya sekitar 400.000 setiap tahunnya (Kompas, 2023). Jika dilihat dari pertumbuhannya, belum terdapat lonjakan lulusan TIK baik dari perguruan tinggi serta sekolah menengah kejuruan di Indonesia. Data lainnya juga mengungkapkan bahwa hanya sekitar 16 persen lulusan ilmu komputer yang berhasil memasuki dunia kerja (Tempo, 2023). Data-data tersebut menunjukkan bahwa selain dari sisi kuantitas, kesenjangan juga terjadi dari sisi kualitas.

Asia Pacific Digital Study menyebutkan: sekitar 84 persen pemberi kerja di Indonesia kesulitan dalam menemukan karyawan dengan keterampilan digital sesuai dengan yang mereka butuhkan (Kompas, 2023).

"dari segi penjelasan dan praktek di SMK masih kurang, masih banyak siswa magang yang diberi pekerjaan tidak sesuai dengan jurusannya, seperti pekerjaan administrasi" (Alumni SMK)

"karena dosen tidak berhubungan langsung dengan industri, jadi terkadang yang diajarkan sudah out of date" (Sarjana TIK)



Selain itu, statistik menunjukkan bahwa hanya 50% dari talenta digital di Indonesia yang memiliki keterampilan digital tingkat dasar dan menengah, sementara hanya 1% memiliki keahlian tingkat lanjut di bidang seperti *Artificial Intelligence* (AI) dan *Internet of Things* (IoT).

Kemudian, terkait dengan pelaksanaan program pelatihan digital yang dilakukan pemerintah yakni DTS, diakui oleh banyak pihak sudah sangat baik dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Namun karena sebagian besar dilakukan secara daring, maka terdapat beberapa hal yang dirasa peserta menjadi kendala dalam proses *transfer knowledge*.

"materi bagus, namun karena online sayang kalau tidak bisa praktikum secara maksimal" (Alumni DTS)

"karena online, kadang terganggu jaringan yang tidak stabil" (Alumni DTS)

2. Diseminasi Kebijakan Talenta Digital Belum Menjadi Habitua di Level Pemerintah Daerah



Kebijakan terkait talenta digital masih menjadi kebijakan hulu (dalam ruang lingkup kebijakan nasional), belum diterjemahkan secara konkrit ke dalam kebijakan daerah. Salah satu indikatornya tercermin dari dokumen perencanaan Diskominfo yang ada di pemerintah daerah. Ruang lingkup program di dalam Renstra Diskominfo adalah Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, serta Program Penyelenggaraan Persandian (Perubahan Renstra Diskominfo Kota Samarinda Periode 2021 – 2026).

Selain itu kebijakan pemerintah daerah dalam mencetak talenta digital juga dirasa masih kurang. Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny (2021) menyatakan bahwa masih ada beberapa daerah yang belum ambil bagian dalam pelaksanaan program pelatihan kecakapan digital atau yang dikenal dengan *Digital Talent Scholarship* (DTS). Fakta ini juga terlihat dari sebaran peserta DTS yang masih didominasi dari Jawa, Sulawesi dan Sumatera. Kondisi ini tentu berdampak terhadap akselerasi pembangunan sumber daya manusia di bidang digital.

3. Infrastruktur Digital Masih Perlu Dioptimalkan

Dukungan kebijakan dan anggaran yang telah dilakukan dalam membangun infrastruktur digital selama ini, ternyata masih belum mampu menyokong transformasi digital yang berkorelasi dengan keberadaan talenta digital.

"Permasalahan infrastruktur digital dan akses internet masih menjadi permasalahan utama dalam proses transformasi digital di Indonesia. Posisi Indonesia cenderung berada di tengah-tengah, meskipun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun"
(Republika.Co.id, 2023)

Representasi lainnya terkait permasalahan infrastruktur digital di Indonesia adalah berkaitan dengan kecepatan internet, baik untuk jaringan *mobile* maupun *fixed broadband*. Kondisi saat ini masih memprihatinkan (laporan terbaru *Speedtest Global Index* per Juli 2023). Untuk *internet mobile*, Indonesia menduduki peringkat ke-96 dari 143 negara di dunia, dengan kecepatan *internet mobile* rata-rata di Tanah Air 24,21 Mbps. (CNBC, 2023).

ALTERNATIF SOLUSI

Kesenjangan talenta digital menjadi isu penting untuk ditindak lanjuti dalam proses transformasi digital. *Policy brief* ini menawarkan strategi (alternatif kebijakan) terkait upaya membenahi permasalahan kesenjangan talenta.

1 Penguatan Kebijakan Pemerintah Pusat. Upaya yang dapat dilakukan yakni dengan memperbanyak kemitraan dengan swasta dalam melaksanakan program *bootcamp* di daerah-daerah. Program ini juga dapat diupayakan dilakukan dengan menggandeng alumni DTS lokal berprestasi. Melalui program *bootcamp*. Praktikum dapat dilakukan secara optimal, sehingga pelatihan lebih intensif dalam menghasilkan tenaga digital yang sesuai kebutuhan industri dalam waktu yang singkat.

Kebijakan penyediaan infrastruktur dilakukan melalui akses internet gratis di ruang-ruang publik dengan kecepatan akses yang bagus. Harapannya, akses internet gratis yang tersedia dapat digunakan dengan baik untuk belajar darimana saja, terutama bagi generasi muda sebagai target talenta digital.

2

3 Pengarusutamaan Kebijakan Talenta Digital ke dalam IKU Daerah. Pemerintah Daerah perlu memasukkan kebijakan Talenta Digital ke dalam indikator perencanaan pembangunan daerah. Upaya ini lebih memastikan pemerintah daerah memiliki target capaian yang jelas dalam menghasilkan talenta digital. Penentuan target juga diikuti dengan penyusunan rencana aksi (*quick win*) seperti: kuota beasiswa khusus bagi pelajar di bidang TIK, insentif bagi SDM berprestasi yang mengikuti program DTS Kementerian Kominfo, kemitraan dengan swasta dunia usaha dalam melakukan inkubator digital skill serta menciptakan talenta digital.

Memperkuat Ekosistem Talenta Digital

Pertama, dosen serta pengajar di sekolah membentuk komunitas pengajar digital untuk *sharing knowledge* dalam meningkatkan kapasitas. Komunitas ini menggandeng DUDI serta profesional. Dalam proses ini dapat menjadi media penyelarasan kurikulum di perguruan tinggi maupun sekolah sesuai dengan digital skill yang dibutuhkan dunia kerja. Komunitas dapat menjadi jembatan bagi Perguruan Tinggi serta Sekolah ketika membutuhkan praktisi pengajar.

Kedua, replikasi Program Praktisi Mengajar serta Program Kampus Merdeka di jenjang SMK. Agar proses alih pengetahuan dan keahlian dari dunia kerja ke SDM dapat dilakukan lebih dini. Selain itu perlu juga dipastikan bahwa program pemagangan bagi siswa SMK bidang TIK harus berbasis *real case project* yang terstandar industri. Penguatan kurikulum talenta digital juga perlu dilakukan ke level pendidikan sekolah menengah, sekolah dasar, bahkan Taman Kanak-Kanak. Implementasinya, dapat dimasukkan ke dalam proses pembelajaran atau menjadikannya sebagai kegiatan ekstrakurikuler, yang disesuaikan dengan tingkatan kelasnya.

5

Pemantauan Alumni DTS. Terdapat tingkatan dalam pembelajaran DTS (dasar, menengah, hingga tingkat lanjutan). Agar keterpenuhan *digital talent* dapat tercapai hingga ke tingkat lanjutan, maka setiap alumni di setiap tingkatan dipantau untuk dapat terus naik ke tingkatan berikutnya. Agar proses kenaikan tingkat dapat lebih masif, maka komunitas dapat berkontribusi dalam membuat kelas pembelajaran untuk pelaksanaan diklat di tingkat menengah dan tingkat lanjutan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dari lima alternatif kebijakan yang disampaikan, penulis merekomendasi kelima alternatif untuk ditindak lanjuti sebagai agenda kebijakan. Namun demikian, pengarusutamaan Talenta Digital ke dalam Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah, dapat dijadikan prioritas sebagai penguatan kebijakan talenta digital. Adanya landasan kebijakan yang jelas, dapat lebih mengarahkan dan mengkonkritkan atas pemenuhan aspek SDM, finansial ataupun regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

Kominfo. Rencana Strategis 2020–2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika
https://www.kompas.id/baca/adv_post/ini-5-skill-yang-dibutuhkan-untuk-menjadi-talenta-digital

<https://stekom.ac.id/artikel/mengatasi-krisis-talenta-digital-dengan-pendidikan-vokasi>

<https://jakartaurbanhosting.com/indonesia-darurat-talenta-digital-di-2023-apa-solusinya/>

Katadata. 2022. Asah Keterampilanmu Agar Jadi Talenta Digital Anda.
<https://katadata.co.id/infografik/6257ebc14a959/asah-keterampilanmu-agar-jadi-talenta-digital-anda>

Kompas. 2023. Cetak 100.000 Sarjana TI Per Tahun, bagaimana Indonesia mandiri TI?.
<https://tekno.kompas.com/read/2023/07/08/17200607/cetak-100000-sarjana-ti-per-tahun-bagaimana-indonesia-bisa-mandiri-ti?page=all>

Tempo. 2023. Hacktiv8 jembatani Kekurangan Talenta Teknologi di Indonesia. <https://koran.tempo.co/read/info-tempo/481522/hacktiv8-jembatani-kekurangan-talenta-teknologi-di-indonesia>

Kompas. 2023. Pasokan Pekerja Terampil Teknologi Masih Sangat Kurang.
https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/02/22/masih-ada-kesenjangan-kebutuhan-suplai-pekerja-terampil-teknologi?open_from=Tagar_Page